

TAJUK RENCANA

Hari Kemenangan Rakyat

HARI pencoblosan Pemilu Rabu 14 Februari 2024 telah terseleksi dengan kondisi relatif baik, meski di sana-sini masih ada kekurangan. Namun, sebagai even demokrasi lima tahunan, kita masih menganggap pesta rakyat ini berlangsung relatif aman. Bahwa kemudian ada sebagian daerah harus diselenggarakan secara khusus, yakni dengan memindahkan TPS karena faktor bencana dan sebagainya, masih wajar sepanjang memenuhi syarat normatif penyelenggaraan pemilu.

Sebelum hari pencoblosan, suara agar pemilu berjalan lancar dan jujur sudah bergaung di mana-mana. Masyarakat diminta untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Bahkan, di level aparat, sudah disediakan posko pengaduan, termasuk menyangkut netralitas aparat TNI/Polri. Sejauh mana efektivitas posko, masih harus direview dan dievaluasi. Tapi, paling tidak sudah ada saluran untuk mengadu. Soal apakah pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak, itu soal lain lagi yang juga tetap harus diawasi.

Tak hanya di jajaran pemerintah, dalam hal ini KPU dan Baswaslu, hampir setiap tim paslon juga menyediakan pos atau saluran aduan ketika mendapati kecurangan. Tentu karena ini sifatnya internal, yang diadakan cenderung kecurangan yang dilakukan paslon lain. Kita masih bersyukur pemilu di Indonesia dapat terselenggara dengan relatif aman, dibanding di sejumlah negara yang masih berkecamuk akibat konflik internal yang berimbas pada perang saudara.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, sebelum KPU mengumumkan secara resmi siapa 'pemenang' atau paslon yang mendapat suara terbanyak dalam pemilu 2024, khususnya Pilpres, tim pemenang paslon sudah mengumumkan hasilnya versi

mereka. Berdasar UU Pemilu No 7 Tahun 2017 memang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengadakan penghitungan cepat atau quick count dan bisa diumumkan paling cepat setelah 2 jam usai pencoblosan di wilayah Indonesia bagian barat.

Sementara KPU belum mengumumkan secara resmi hasil Pemilu 2024. Untuk itulah perlu saling tenggang rasa antarkontestan. Yang merasa menang tidak perlu jumawa, yang kalah pun harus 'legawa' dan tak perlu berkecil hati, itulah konsekuensi kontestasi Pemilu 2024.

Sebenarnya, kalau mau jujur, kemenangan kontestan, baik dalam konteks pilpres maupun pilleg, semua milik rakyat. Sebab, rakyatlah yang memilih mereka. Tanpa suara rakyat, mereka bukan siapa-siapa. Karenanya, kalau mau disebut sebagai kemenangan dalam pemilu 2024, maka sesungguhnya kemenangan itu adalah milik rakyat, singkatnya kita sebut kemenangan rakyat.

Harus diakui sejauh ini Pemilu 2024 masih terfokus pada pilpres, masyarakat pun terpolarisasi pada tiga kubu, Anies-Muhammad, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Padahal juga ada pilleg yang tak kalah penting untuk memilih wakil rakyat di DPR pusat, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Demokrasi elektoral ini juga akan menentukan wajah Indonesia lima tahun ke depan.

Kiranya sudah tidak zamannya lagi masyarakat fanatik buta pada pilihannya, karena polarisasi hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, bersatu lagi dan mendukung pemimpin yang terpilih secara konstitusional. Bahwa kemudian diketahui ada kecurangan, sudah ada mekanisme untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, yakni di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih penting lagi, rakyat harus mengawasi, termasuk mengawasi MK. □d

Dinamika Kekuasaan dan Kontrol Publik

PADA satu diskusi teman saya bertanya : *imengapa politisi yang dahulu dianggap perwakilan rakyat saat ini menunjukkan gelagat yang sangat haus kekuasaan??.* Melihat kondisi sekarang, tampaknya pertanyaan tersebut menjadi relevan.

Ia pun mengajak melihat Jokowi yang menjadi satu-satunya presiden yang berangkat dari 'keluarga biasa' dan dianggap akan mewakili kepentingan rakyat dengan latar belakang tersebut. Harapan masyarakat akan sistem demokrasi yang lebih baik muncul saat dirinya menjadi Calon Presiden 2014.

Satu dekade berlalu, identitas sebagai pemimpin yang mewakili *wong cilik* ini bergeser pada frasa lain yang banyak dilekatkan pada sosoknya sebagai pelaku 'politik dinasti'. Menjelang akhir periodenya, Jokowi melakukan manuver politik dengan mengangkat putranya, Gibran Rakabuming Raka yang usianya saat itu dianggap tidak memenuhi syarat minimum. Tidak berhenti di situ, anggapan intensi politik dinasti Jokowi kembali diperkuat setelah putra bungsunya, Kaesang Pangarep terpilih sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia dua hari setelah ia bergabung.

Cenderung Korup

Kembali ke pertanyaan awal tadi, penulis menjawabnya dengan frasa klasik *power tends to corrupt* atau kekuasaan itu cenderung korup. Diskusi bisa saja berhenti di situ tapi di satu masa penulis kembali merenungi jawaban tersebut. Apakah *conventional wisdom* tersebut benar-benar terjadi?

Benarkah kekuasaan mendorong seseorang-sekali pun dia 'baik' untuk berperilaku korup. Atau, justru, orang-orang korup ini yang kemudian memperoleh akses atas kekuasaan melalui proses demokratis? Apakah seorang tiran terlahir secara natural atau ia terbentuk atas kuasa yang ia dapatkan?

Diskursus tersebut dibahas Brian Klaas dalam bukunya 'Corruptible: Who

Saqib Fardan Ahmada

Gets Power and How It Changes Us. Singkatnya, buku tersebut menjelaskan bahwa bisa saja keduanya. Kekuasaan bisa saja 'mengkorupkan' orang baik. Namun demikian kekuasaan juga menarik orang-orang korup untuk masuk di dalamnya.

Poin menariknya bagi saya bukan di situ, namun ada di kemungkinan lainnya. Bahwa, mungkin kita, sebagai ma-



KR: UNIKSANTOS

Kontrol Publik

Demokrasi haruslah dimaknai sebagai *popular control* (kontrol publik) dalam pengelolaan kepentingan publik (Santoso, 2015). Paling minim, dalam kontestasi elektoral misalnya, kontrol publik dapat dilakukan dengan memilih *the lesser evil* di antara kandidat lain.

Poinnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang tidak korup bisa mendapatkan kekuasaan dan menggunakannya secara adil. Karena bisa jadi, banyak politisi yang awalnya populis, saat masuk dalam arena kekuasaan lepas dari kontrol publik. Ia kemudian tenggelam dalam sistem yang buruk dan berlaku sewenang-wenang.

Kita sebagai kelompok masyarakat haruslah memprioritaskan kandidat yang paling bisa dikritik dan dikawal, serta bisa mempertahankan ruang bagi kontrol publik dari masyarakat sipil. Memang, hal ini ialah langkah paling dasar. Karenanya, persoalan ini tidak dapat dibiarkan berhenti pada memilih dan tidak memilih saja.

Lebih dari itu, kontrol publik juga harus bisa *beyond* demokrasi elektoralistik. *Demos* haruslah ditempatkan sebagai pelaku utama dalam proses demokrasi di Indonesia bernegara (Prabawanti, 2015). Demokratisasi di level akar rumput perlu didorong karena ia menjadi elemen dasar hidup. □d

*) **Saqib Fardan Ahmada**, Staf Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Bersyukur Sleman Cepat Bersih APK

MASA tenang cukup membuat tenang. Karena alat peraga kampanye (APK) di wilayah Sleman lumayan cepat bersih. Sejak Senin(12/2) pelbagai jalan dan perkampungan di Sleman tampak sudah bersih dari APK. Rasanya bisa bernafas lega, tidak terteror APK. Meski ada di beberapa dusun, masih berkibar bendera-bendera besar dan hingga Selasa (13/2) belum ada inisiatif menurunkan.

Artinya, bersih sekali juga belum. Karena di Jl Kaliurang masih ada balih besar cawapres. Atau mungkin di tempat lain yang terlewat dari pantauan saya. Hanya soal ini saya merasa bersyukur, Sleman relatif cepat menurunkan APK pada masa tenang. Sehingga tidak banyak gerutuan seperti pemilu lalu, karena sudah habis masa tenang pun masih bertebaran poster, spanduk, balihho. □d

*) **P Wahyu**, Malangrejo Sleman

Beras Mahal, Supermarket Kosong?

BEBERAPA waktu lalu saya merasa heran karena mencari beras untuk bulanan yang tidak banyak, artinya tidak sampai belasan kilo namun yang dicari tyidak ada. Rak beras kosong, termasuk beras organik yang biasa kami konsumsi. Bingung, padahal hanya butuh 4 kg setiap bulan, meski itu selalu tersisa. Karena kami sekeluarga memang kelompok yang tidak meng-

haruskan mengonsumsi nasi. Setelah putar-putar di supermarket akhirnya bertanya pada salah seorang karyawan disitu. Jawabannya : beras kosong. Setelah sampai rumah baru sadar harga beras meubung tinggi, sehingga banyak beras menghilang. Kok bisa ya? Padahal kemarin baru ada yang bagi-bagi beras..... □d

*) **Endah SE**, Jl Godean Sleman

Kompleksnya Penanganan Stunting

STUNTING beberapa waktu lalu menjadi perdebatan dalam debat capres pamungkas. Pasalnya ada paslon yang menanggapi penanganan stunting dengan cara memberikan susu dan makan siang gratis. Padahal kompleksitas stunting terjadi bukan hanya masalah pola makan. Kompleksitas penanganan stunting juga tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Pemerintah hanya menjadi salah satu peran dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Program penanganan stunting berlomba dengan waktu. Usia dua tahun menjadi krusial dalam penanganan stunting. Maka dari itu program penurunan stunting ini sangat perlu dukungan dan partisipasi masyarakat, organisasi atau lembaga swasta, ataupun universitas. Melalui gerakan masyarakat sadar stunting untuk pencegahan dan pemberantasan kasus stunting.

Edukasi

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan stunting antara lain dengan edukasi tentang pola makan yang seimbang dan asupan gizi yang cukup pada anak-anak dan ibu hamil. Serta upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang stunting dan dampak buruknya pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Peningkatan akses pada layanan kesehatan (termasuk pemeriksaan rutin dan imunisasi bagi anak-anak), air bersih, dan sanitasi yang memadai. Serta ketersediaan dan akses pada bahan makanan yang kaya nutrisi, seperti sayuran dan buah-buahan. Edukasi terkait pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan dan informasi terkait MPASI yang sehat.

Edukasi terkait pentingnya pemantauan perkembangan anak dan memeriksakan anak ke posyandu se-

Anif Muchlashin

cara teratur. Edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ada petugas pendamping dalam pelaksanaannya. Tugas lini lapangan dimulai dari Tim Pendamping Keluarga atau TPK. TPK terdiri dari 3 unsur masyarakat yakni Kader PKK, Kader IMP dan Bidan. Kader ini akan mendampingi khusus kepada 5 sasaran yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin (bupas), Baduta dan Balita.

Pemerintah membuat jejaring kesehatan lengkap dan mudah untuk diikuti dalam pelaksanaannya. Pertama pemantauan sasaran keluarga risiko dipantau mulai dari calon pengantin bisa melalui puskesmas melalui cek kesehatan, pengisian elsimil (elektronik pencatatan siap hamil) dari BKKBN, dan bimbingan perkawinan melalui KUA Kemenag.

Sasaran kedua adalah Ibu Hamil. Ibu Hamil nantinya akan di-*screening* dan dikunjungi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari TP PKK, Kader IMP dan Bidan di masing-masing wilayah hingga padukuhan. Jika ditemui ibu hamil kurang energi kronis maka dapat dirujuk ke puskesmas dan jika ke puskesmas belum dapat diatasi maka dapat dirujuk ke rumah sakit ditangani langsung oleh Dokter Spesialis Anak.

Kemudian Baduta dan Balita. Pemantauan pertama adalah mulai dari posyandu. Harapannya setiap bayi untuk datang ke posyandu terdapat setiap bulannya agar terpantau tumbuh kembang anaknya. Baik tinggi badannya maupun berat badannya. Maka waktu emas ini harus dimanfaatkan dengan baik dan jangan

sampai bayi terlambat untuk mendapatkan penanganan hingga sampai stunting.

Peranserta Masyarakat

Tidak ada hal yang tunggal dalam rangka penanganan stunting yang sebabnya dari berbagai macam faktor. Pemerintah sudah menyediakan banyak fasilitas-fasilitas yang dapat diakses. Namun jika peranserta masyarakat belum sadar secara utuh maka penanganan stunting tidak berjalan secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan aktif untuk mengikuti kegiatan posyandu dan posbindu atau kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di desa maupun hingga tingkat padukuhan. Adanya peranserta masyarakat menjadikan penanganan semakin komprehensif dan berkelanjutan dimulai dari keluarga. □d

*) **Anif Muchlashin MA**, Satgas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN DIY

Pojok KR

Sultan HB X diminta menjembatani pertemuan Jokowi-Mega.

-- Untuk kepentingan bangsa, meng-apa tidak.

Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan-distribusi beras.

-- Tak cukup diawasi, ditindak jika melanggar.

Puluhan ribu APK menumpuk di gudang Satpol PP Kota Yogya.

-- Bisa disulap jadi barang bernilai ekonomi.

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permukiman, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP